

# KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP IMIGRAN DARI MEKSIKO PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN BIDEN

Shallom Elzeta Putri, Yuniarti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## Abstrak

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan arus migrasi terbesar di dunia, dan Meksiko menjadi salah satu negara asal utama para imigran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan imigrasinya terhadap imigran dari Meksiko pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen resmi. Landasan konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada teori migrasi serta prinsip perlindungan migran yang ditetapkan oleh IOM dan IFRC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi Biden menekankan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan pendekatan multilateral. Beberapa kebijakan utama seperti pencabutan program “*Remain in Mexico*,” pembentukan gugus tugas reunifikasi keluarga, dan perluasan jalur masuk legal melalui aplikasi CBP One menandakan adanya pergeseran dari kebijakan keras era Trump menuju model yang lebih inklusif. Kebijakan Biden juga konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan migran yang digariskan oleh IOM dan IFRC, termasuk pengakuan atas hak-hak migran, perlindungan sepanjang jalur migrasi, serta fokus pada kebutuhan dan kerentanan mereka.

**Kata Kunci:** Imigran, Kebijakan Imigrasi, Joe Biden, Prinsip-Prinsip IFRC

## Abstract

*The United States is one of the largest migration destinations globally, with Mexico as a primary source country of immigrants. This study aims to analyze how the United States formulates and implements its immigration policy toward immigrant from Mexico during the presidency of Joe Biden. The research adopts a descriptive qualitative method, with data obtained through literature review and analysis of official documents. The conceptual framework is based on migration theory and the principles of migrant protection established by IOM and IFRC. The findings indicate that Biden's immigration policy emphasizes humanitarian values, human rights, and a multilateral approach. Key policies such as the revocation of the “*Remain in Mexico*” program, the formation of a family reunification task force, and the expansion of legal entry pathways via the CBP One application reflect a shift from Trump's hardline stance toward a more inclusive model. Biden's approach also aligns with the migrant protection principles advocated by IOM and IFRC, including the recognition of migrants' rights, protection along migratory routes, and attention to the specific needs and vulnerabilities of migrants.*

**Keywords:** Immigrant, Immigration Policy, Joe Biden, IFRC Principles.

## 1. PENDAHULUAN

Migrasi dari Meksiko ke Amerika Serikat telah berlangsung selama lebih dari satu abad dan diperkuat oleh kedekatan geografis serta hubungan ekonomi yang erat. Peningkatan signifikan terjadi sejak Perang Dunia II melalui Program Bracero (1942–1964), yang secara legal mendatangkan sekitar 4,5 juta pekerja Meksiko ke sektor

pertanian dan infrastruktur di AS (García , 2018). Meski dirancang untuk memberikan perlindungan dan upah yang layak, program ini justru menimbulkan berbagai pelanggaran hak buruh. Setelah program dihentikan, terbatasnya jalur migrasi legal dan tetap tingginya kebutuhan tenaga kerja murah di AS mendorong gelombang migrasi ilegal sebagai alternatif dominan.

**Tabel 1. Data Imigran Legal dan Ilegal dari Meksiko**

Tahun	Imigran Legal dari Meksiko	Estimasi Imigran Ilegal dari Meksiko	Total Imigran dari Meksiko yang masuk ke AS
2010	138,717	6.640.000	6.778.717
2012	146.406	6.050.000	6.196.406
2014	134.052	6.640.000	6.774.052
2016	174.534	5.970.000	6.144.534
2018	161.858	5.540.000	5.701.858
2020	100.325	4.970.000	5.070.325

**Sumber :** (Yearbook of Immigration Statistics, 2024)

Data table di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah imigran ilegal dari Meksiko mengalami penurunan sejak 2016, jumlah total migran tetap signifikan. Pada tahun 2010, tercatat lebih dari 6,6 juta imigran ilegal asal Meksiko berada di Amerika Serikat, jauh melebihi jumlah imigran legal yang hanya sekitar 138.717 orang.

Dalam konteks ini, imigran ilegal dari Meksiko mengacu pada individu yang masuk ke Amerika Serikat tanpa dokumen resmi yang disebut *unauthorized entry*, atau mereka yang masuk secara sah namun menetap setelah masa berlaku visanya habis atau *overstay* (Security, 2021). Pendorong utama migrasi ilegal adalah peluang ekonomi, tingginya upah, ketersediaan lapangan kerja, dan harapan hidup yang lebih baik di Amerika Serikat. Banyak imigran Meksiko yang bekerja di sektor-sektor yang tidak diminati warga lokal, seperti pertanian, layanan rumah tangga, dan konstruksi.

Kehadiran imigran dari Meksiko ke AS telah menjadi isu kompleks yang menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, mereka berkontribusi pada sektor ekonomi seperti pertanian dan konstruksi, namun di sisi lain, sering dianggap membebani sistem sosial dan kesehatan publik, terutama karena rendahnya akses terhadap

asuransi kesehatan dan keterlibatan dalam sektor informal (Rafael, Jonathan, & Song, 2010). Menanggapi hal ini, Presiden Trump menerapkan kebijakan imigrasi ketat seperti pembangunan tembok perbatasan, pemisahan keluarga, dan kebijakan *Remain in Mexico*.

Sebaliknya, Presiden Biden sejak 2021 mengambil pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia, mencabut kebijakan-kebijakan kontroversial, memperluas jalur legal melalui aplikasi *CBP One*, serta membentuk gugus tugas reunifikasi keluarga. Meskipun demikian, kebijakan Biden tetap menghadapi tantangan seperti tekanan politik, krisis di perbatasan, dan kompleksitas sistem imigrasi AS. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan imigrasi Presiden Joe Biden, terutama melalui lima *Executive Orders* nya berhasil memenuhi hak-hak imigran Meksiko, serta apakah pendekatan tersebut mampu mengatasi permasalahan imigrasi dari Meksiko.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kebijakan imigrasi Amerika Serikat terhadap imigran dari Meksiko pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi pemerintah, media massa, serta sumber daring yang relevan dan kredibel.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan dokumen dan literatur terkait guna mengidentifikasi arah kebijakan, dinamika pelaksanaan, tantangan, serta perbedaan kebijakan dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya, terutama era Donald Trump. Penelitian ini juga menggunakan empat prinsip penanganan migrasi dari IFRC sebagai kerangka konseptual, untuk menilai sejauh mana pendekatan kebijakan imigrasi Biden mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak migran.

## LANDASAN KONSEP

### Prinsip IFRC Dalam Penanganan Migrasi

*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)*

mengusung pendekatan humanis dalam menangani persoalan migrasi. IFRC menekankan bahwa semua migran, baik yang memiliki dokumen resmi maupun tidak, berhak untuk diperlakukan dengan adil, bermartabat, dan tanpa diskriminasi (IFRC, 2009). Dalam penelitian ini, digunakan empat dari sepuluh prinsip kebijakan kemanusiaan IFRC sebagai dasar analisis terhadap kebijakan imigrasi Biden:

1. Fokus pada Kebutuhan dan Kerentanan Migran  
Prinsip ini menggabungkan bantuan darurat dengan pemberdayaan jangka panjang, tanpa diskriminasi terhadap status hukum migran.
2. Melibatkan Migran dalam Program Kemanusiaan  
IFRC menekankan pentingnya partisipasi migran dalam perencanaan dan pelaksanaan program, agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.
3. Mengakui Hak-Hak Migran  
Semua migran memiliki hak dasar, termasuk hak atas bantuan kemanusiaan, perlindungan hukum, serta pengakuan terhadap status mereka.
4. Bekerja Sepanjang Jalur Migrasi  
Pendekatan ini mendorong kerja sama lintas negara untuk menjamin perlindungan terhadap migran di setiap tahap perjalanan mereka, dari negara asal hingga negara tujuan.

Keempat prinsip ini dianggap selaras dengan arah kebijakan Presiden Joe Biden yang tidak hanya mengutamakan aspek pengamanan perbatasan, tetapi juga memperhatikan reunifikasi keluarga, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penanganan akar permasalahan migrasi melalui kerja sama regional.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Fenomena Imigran dari Meksiko di Amerika Serikat**

Hubungan migrasi antara Amerika Serikat dan Meksiko telah berlangsung sejak abad ke-19, ketika wilayah seperti Texas, California, dan New Mexico dianeksasi AS dari Meksiko. Mobilitas warga Meksiko ke AS meningkat signifikan melalui Program Bracero (1942–1964), yang mendatangkan lebih dari 4,5 juta pekerja untuk sektor pertanian dan infrastruktur. Meski program tersebut berakhir, tingginya kebutuhan tenaga kerja dan terbatasnya jalur legal mendorong migrasi ilegal,

terutama ke sektor informal seperti konstruksi, manufaktur, dan jasa rumah tangga (Douglass, 2002).

Imigran ilegal umumnya melintasi perbatasan darat melalui kota-kota seperti Tijuana dan Ciudad Juárez, atau menggunakan rute laut secara terbatas. Faktor pendorong migrasi dari Meksiko meliputi kemiskinan, kekerasan kartel, dan ketimpangan sosial, sementara faktor penarik dari AS mencakup peluang ekonomi dan stabilitas politik (Douglass, 2002). Menurut teori migrasi Everett S. Lee, perpindahan ini didorong oleh kombinasi faktor positif, negatif dan netral dari negara asal dan tujuan (Lee, 1991).

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa 96,7% imigran ilegal asal Meksiko aktif bekerja dan berkontribusi besar di sektor pertanian (11,5%), konstruksi (6,7%), dan perhotelan (3,4%) (Fund, 2021). Namun, mereka juga menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan akses layanan publik dan keterkaitan dengan penyelundupan narkoba, terutama fentanyl, yang didalangi kartel-kartel besar.

**Tabel 2. Industri Teratas Berdasarkan Bagian Tenaga Kerja, Imigran Meksiko Ilegal tahun 2019**

Industri	Pekerja Imigran Ilegal Meksiko	Total Tenaga Kerja	Bagian Tenaga Kerja
Pertanian	224.000	1.943.000	11,5%
Konstruksi	733.000	11.016.000	6,7%
Pariwisata, Perhotelan, dan Hiburan	524.000	15.365.000	3,4%
Layanan Umum dan Pribadi	202.000	7.597.000	2,7%
Manufaktur	370.000	15.800.000	2,3%

**Sumber : New American Economy Research Fund, 2021**

Penegakan hukum tanpa program integrasi sosial memperparah marginalisasi. Sementara pemerintahan Trump menerapkan kebijakan represif seperti *Zero Tolerance* dan *Remain in Mexico*, Presiden Biden berupaya menerapkan pendekatan yang lebih humanis, menekankan reunifikasi keluarga, legalisasi terbatas, dan sistem masuk legal melalui aplikasi CBP One. Pendekatan ini selaras dengan prinsip IOM dan IFRC, yang menekankan hak asasi manusia dan perlindungan migran sepanjang jalur migrasi.

### Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Menangani Imigran dari Meksiko

Dalam menangani isu migrasi dari Meksiko, para Presiden AS menerapkan pendekatan berbeda, dipengaruhi oleh afiliasi politik, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial. Presiden Bill Clinton menandatangani IIRIRA 1996 untuk memperketat deportasi dan memberlakukan sanksi imigrasi, namun tetap melindungi imigran legal. George W. Bush menyeimbangkan antara keamanan nasional terutama pasca 9/11, dengan kepentingan ekonomi, melalui *Secure Fence Act 2006* dan usulan program *guest worker*. Sedangkan Presiden Barack Obama, memperkenalkan DACA tahun 2012 untuk melindungi imigran muda, dengan mayoritas penerima berasal dari Meksiko. Sebaliknya, Donald Trump mengadopsi pendekatan keras dan eksklusif seperti *Zero Tolerance*, MPP, dan penggunaan *Title 42*, yang menyebabkan krisis kemanusiaan di perbatasan.

Presiden Joe Biden membalik arah dengan menekankan nilai kemanusiaan. Ia mencabut kebijakan pemisahan keluarga, memulihkan DACA, menghapus *Title 42*, serta memperluas jalur legal melalui *CBP One*. Kebijakannya sejalan dengan prinsip penanganan migrasi oleh IFRC yang menekankan perlindungan hak migran dan kerja sama lintas batas, meski menghadapi hambatan politik di dalam negeri.

**Tabel 3. Perbandingan Kebijakan Imigrasi AS Terhadap Imigran dari Meksiko berdasarkan Afiliasi Partai Presiden**

Presiden	Masa Jabatan	Partai	Kebijakan Imigrasi terhadap Imigran Meksiko
Bill Clinton	1993–2001	Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IIRIRA 1996: memperketat deportasi dan pengawasan.</li> <li>- Dampak NAFTA: memicu migrasi karena ketimpangan ekonomi.</li> </ul>
George W. Bush	2001–2009	Republik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patriot Act: memperketat kontrol imigrasi pasca-9/11.</li> <li>- Peningkatan personel Border Patrol dan kerja sama dengan Meksiko.</li> </ul>
Barack Obama	2009–2017	Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DACA (2012): perlindungan untuk Dreamers.</li> <li>- Fokus pada imigran kriminal.</li> </ul>
Donald Trump	2017–2021	Republik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Zero Tolerance</i>: kriminalisasi pelintas ilegal, pemisahan keluarga.</li> <li>- Pembangunan tembok perbatasan.</li> <li>- MPP (Remain in Mexico).</li> <li>- Pembatasan suaka dan travel bans.</li> </ul>
Joe Biden	2021–2025	Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghentikan pemisahan keluarga dan upaya mengakhiri MPP.</li> <li>- Pemulihan DACA dan dorongan Dream Act.</li> <li>- Penghapusan <i>Title 42</i> dan kebijakan pembatasan suaka.</li> </ul>

Sumber : (Pierce, 2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Partai Demokrat umumnya mengutamakan pendekatan inklusif dan reformis, dengan fokus pada perlindungan hak asasi dan akses legal. Sementara itu, Partai Republik cenderung menekankan keamanan perbatasan dan kontrol migrasi yang ketat. Hingga era Obama, masih terlihat keseimbangan antara penegakan hukum dan pengakuan kontribusi ekonomi imigran.

Namun, kebijakan Trump menandai pergeseran drastis ke arah represif dan eksklusif. Di era Biden, kebijakan kembali bergeser ke arah humanis dan multilateral, mencerminkan bahwa arah kebijakan imigrasi AS sangat dipengaruhi oleh ideologi partai dan dinamika politik nasional, namun tetap merespons kompleksitas migrasi dari Meksiko.

### **Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat Terhadap Imigran dari Meksiko Masa Joe Biden tahun 2021 – 2024**

Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021 menandai dimulainya era baru kepemimpinan di Gedung Putih, menggantikan pemerintahan Donald Trump. Sejak hari pertama menjabat, Presiden Biden langsung menunjukkan arah kebijakan, salah satunya kebijakan imigran. Ia menandatangani lima *Executive Orders* yang mencerminkan langkah awal untuk membalikkan banyak kebijakan kontroversial dari pemerintahan sebelumnya. Di antara EO tersebut, tiga secara eksplisit membatalkan kebijakan Donald Trump. Kelima EO ini sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan migrasi menurut IFRC (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*). Kelima EO tersebut adalah EO 13993, EO 14010, EO 14011, EO 14012 dan EO 13986:

- a. EO 13993 – *Revision of Civil Immigration Enforcement Policies and Priorities Executive Order (EO) 13993*

EO ini ditandatangani oleh Presiden Biden pada 20 Januari 2021 merupakan salah satu bentuk kebijakan yang mencerminkan prinsip pengakuan terhadap hak-hak dasar migran, sebagaimana ditekankan oleh *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)*, yaitu bahwa setiap migran memiliki hak atas perlindungan hukum, kesatuan keluarga, serta akses terhadap proses hukum yang adil. EO ini mencabut kebijakan pemerintahan Trump sebelumnya EO 13768 *Enhancing Public*

*Safety in the Interior of the United States* yang memperluas cakupan deportasi secara luas tanpa mempertimbangkan keadilan prosedural.

Dalam pelaksanaannya, EO 13993 memerintahkan *U.S. Department of Homeland Security* (DHS) untuk mengevaluasi dan memperbarui pedoman penegakan hukum perdata imigrasi (The White House, 2021). Salah satu langkah nyata dari kebijakan ini adalah moratorium deportasi selama 100 hari bagi imigran yang telah menetap di AS sebelum 1 November 2020. Tujuan dari moratorium ini adalah untuk memberikan waktu kepada DHS dalam meninjau ulang kebijakan penegakan hukum imigrasi pemerintahan sebelumnya dan menyusun kebijakan baru yang lebih adil dan manusiawi (U.S. Department of Homeland Security, 2021). Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menghentikan deportasi massal sementara, demi memastikan bahwa penegakan hukum imigrasi dilakukan secara selektif, proporsional, dan tidak melanggar hak-hak dasar migran.

Implementasi EO 13993 terhadap imigran ilegal mencerminkan pergeseran besar dalam prioritas deportasi. Pemerintah melalui *Department of Homeland Security* (DHS) dan *Immigration and Customs Enforcement* (ICE) mengeluarkan memo yang memperkenalkan *prosecutorial discretion*, yakni kebijakan di mana petugas imigrasi diberikan wewenang untuk menunda atau bahkan menghentikan proses deportasi terhadap individu yang bukan prioritas utama, seperti imigran ilegal yang telah lama tinggal di AS, memiliki keluarga warga negara AS, atau tidak memiliki catatan kriminal. Prioritas sekarang diberikan pada individu yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, pelaku kejahatan serius (*aggravated felonies*), atau pelintas ilegal yang baru masuk setelah November 2020 (Lind, 2023).

Akibatnya, terjadi penurunan drastis angka deportasi yaitu, hanya 1.900 imigran yang dideportasi oleh ICE pada Februari 2021, dibandingkan dengan 4.400 pada Desember 2020, menunjukkan penurunan lebih dari 50% hanya dalam dua bulan awal pemerintahan Biden. Selain itu, sebuah laporan dari Syracuse University juga menunjukkan bahwa hanya 8% dari sekitar 300.000 kasus deportasi yang aktif pada awal 2021 termasuk dalam prioritas baru yang ditetapkan oleh EO ini (TRAC Immigration, 2021).

Sementara itu, bagi imigran legal, EO 13993 memberikan ruang yang lebih aman melalui peninjauan ulang kasus deportasi yang sedang berlangsung. Banyak kasus yang sebelumnya diarahkan ke proses pengusiran administratif kini diberhentikan atau ditunda melalui mekanisme *administrative closure*. Hal ini membantu mengurangi beban backlog pengadilan imigrasi, serta memberikan kesempatan bagi imigran legal yang memiliki jalur perubahan status untuk mengurus dokumen mereka tanpa ancaman deportasi mendadak. Dalam hal ini, kebijakan ini juga memberikan kepercayaan hukum bagi mereka yang telah berintegrasi dalam masyarakat namun terdampak oleh kebijakan keras sebelumnya (*American Immigration Lawyers Association, 2022*).

- b. EO 14010 – *Creating a Comprehensive Regional Framework to Address the Causes of Migration, to Manage Migration Throughout North and Central America, and to Provide Safe and Orderly Processing of Asylum Seekers at the United States Border*

*Executive Order* 14010 yang ditandatangani Presiden Joe Biden menginstruksikan *U.S. Department of Homeland Security* (DHS) untuk mengevaluasi kembali kebijakan *Migrant Protection Protocols* (MPP), termasuk kemungkinan penghapusan total dan pembatalan memorandum pelaksanaan MPP yang diterbitkan pada Januari 2019. EO ini juga menekankan koordinasi lintas lembaga antara Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, Direktur CDC, dan Menteri DHS untuk menyusun strategi bertahap dalam memastikan masuknya imigran secara aman dan teratur, khususnya bagi mereka yang terdampak kebijakan MPP dan sedang menjalani proses permohonan suaka.

EO ini bertujuan membentuk kerangka kerja regional yang komprehensif untuk mengatasi akar penyebab migrasi, mengelola migrasi secara menyeluruh, dan menyediakan jalur pemrosesan suaka yang aman dan tertib. Implementasi nyata dari kebijakan ini dapat dilihat melalui peluncuran aplikasi *CBP One*, yang menjadi salah satu instrumen utama dalam pengaturan migrasi legal bagi pencari suaka maupun imigran tanpa dokumen. Melalui *CBP One*, imigran dapat menjadwalkan janji temu di pelabuhan masuk resmi AS alih-alih melintasi perbatasan secara ilegal.

Sejak peluncuran aplikasi *CBP One* pada Januari 2023, implementasi *Executive Order* 14010 telah memberikan dampak signifikan dalam menciptakan jalur legal bagi migran dari Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah. Hingga November 2024, lebih dari 904.500 imigran telah berhasil menjadwalkan janji temu melalui *CBP One*, yang memungkinkan mereka masuk secara sah ke AS melalui pelabuhan resmi (U.S. Customs and Border Protection, 2024). Dari jumlah tersebut, sekitar 95,8% imigran dilepas ke dalam wilayah AS dengan status parole, yang berarti mereka dapat tinggal secara legal sementara tanpa penahanan (*Center for Immigration Studies*, 2024).

Tercatat bahwa pada bulan November 2024, untuk pertama kalinya sejak pandemi, jumlah imigran yang masuk melalui jalur legal melebihi jumlah imigran yang ditangkap oleh *Border Patrol* karena menyeberang secara ilegal (*Migration Policy Institute*, 2024). Selain itu, tingkat penyeberangan ilegal di perbatasan menurun hingga 81% dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya di sektor-sektor perbatasan selatan seperti El Paso dan Del Rio (CBP, 2024). Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *Work Along the Migratory Trails* yang dianjurkan oleh *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC), yaitu perlindungan tidak hanya di titik kedatangan, tetapi sepanjang jalur migrasi.

Bagi imigran ilegal, EO ini menciptakan peluang baru untuk mengakses perlindungan dan legalitas melalui proses parole kemanusiaan. Sekitar 96% pengguna *CBP One* pada tahun 2023 tidak ditahan dan diizinkan masuk dengan status sementara (*Notice to Appear*), hanya 4% yang mengalami penahanan atau deportasi (*U.S. Government Publishing Office*, 2024). Ini menunjukkan perubahan pendekatan dari penegakan hukum yang represif ke arah kebijakan yang lebih inklusif dan manusiawi. Sementara itu, bagi imigran legal, EO 14010 memperluas akses dan memperkuat jalur hukum dalam pengajuan visa dan proses suaka, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga. Jalur ini juga memungkinkan mereka memperoleh dokumen kerja dan mulai berproses dalam sistem hukum imigrasi secara resmi.

c. EO 14011 – *Establishment of Interagency Task Force on the Reunification of Families*

*Executive Order 14011* mencerminkan penerapan prinsip IFRC tentang pentingnya memfokuskan bantuan pada kebutuhan dan kerentanan migran, khususnya mereka yang mengalami dampak langsung dari kebijakan represif sebelumnya. Dengan membentuk *Interagency Task Force on the Reunification of Families*, pemerintah AS menunjukkan komitmen untuk merespons kebutuhan mendesak para migran yang paling rentan, seperti anak-anak tanpa pendamping dan keluarga yang terpisah akibat kebijakan *zero tolerance* di masa pemerintahan sebelumnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memfasilitasi reunifikasi keluarga yang terpisah akibat kebijakan tersebut dengan membentuk sebuah satuan tugas khusus yaitu *Interagency Task Force on the Reunification of Families* agar keluarga-keluarga tersebut dapat dipertemukan kembali.

Untuk mengoordinasikan upaya ini, *task force* terdiri dari berbagai instansi penting, antara lain Menteri Keamanan Dalam Negeri sebagai ketua, serta Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan dan Layanan Manusia, Jaksa Agung, dan lembaga-lembaga terkait lainnya sebagai wakil atau anggota. *Task force* bertugas untuk mengidentifikasi seluruh anak di bawah usia 18 tahun yang dipisahkan dari orang tuanya di perbatasan AS-Meksiko antara 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021, serta mengurus proses reunifikasi mereka.

Dalam praktiknya, *task force* bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) seperti *American Civil Liberties Union (ACLU)*, yang telah memainkan peran penting dalam pelacakan keluarga dan pengajuan pembebasan bersyarat kemanusiaan bagi orang tua yang masih berada di luar AS. Pemerintah juga menyediakan akses bantuan hukum dan fasilitas pemrosesan visa secara prioritas bagi keluarga yang ingin dipersatukan kembali.

Selain proses hukum dan administratif, fokus utama *task force* adalah pada aspek kemanusiaan. Untuk itu, dilakukan kolaborasi dengan *U.S. Department of Health and Human Services (DHHS)* dalam menyediakan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial. Layanan ini mencakup penilaian klinis kesehatan mental, dukungan trauma,

serta program pelatihan keterampilan pengasuhan (*parenting skills*) guna membantu orang tua dan anak beradaptasi kembali dalam kehidupan bersama setelah mengalami pemisahan paksa. Program ini juga dirancang untuk memperkuat reintegrasi keluarga secara jangka panjang dan mengurangi risiko trauma berkelanjutan.

Data resmi dari DHS menunjukkan bahwa hingga ulang tahun kedua pembentukan tugas tersebut pada 2 Februari 2023, lebih dari 600 anak telah direunikan dengan keluarganya, dan total 2.926 anak berhasil diidentifikasi dan dipertemukan kembali sejak awal tugas dimulai (U.S. Department of Homeland Security, 2023). Hal ini menegaskan bahwa implementasi EO 14011 bukan hanya simbolik, melainkan juga menghasilkan hasil nyata dalam memulihkan keluarga migran yang paling rentan.

d. EO 14012 – *Restoring Faith in Our Legal Immigration Systems and Strengthening Integration and Inclusion Efforts for New Americans*

Sejak dikeluarkannya EO 14011 pada 2 Februari 2021, pemerintahan Presiden Biden membentuk *Family Reunification Task Force* untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah akibat kebijakan *Zero Tolerance* era Trump. Hingga 17 Januari 2023, *Task Force* telah mengidentifikasi 3.923 anak yang termasuk dalam ruang lingkup EO tersebut, serta berhasil menggabungkan 599 anak dengan orang tua mereka melalui koordinasi lintas lembaga dan NGO yang sebelumnya, sebanyak 2.297 anak telah di reunifikasi sebelum pembentukan *Task Force*, sehingga totalnya menjadi 2.896 reuni (U.S. Department of Homeland Security, 2023). Pada laporan interim tanggal 16 Maret 2023, jumlah anak yang gagal reuni tumbuh sedikit sambil masih dalam proses, dengan total 652 anak yang telah reuni dengan keluarga mereka, sementara 102 anak masih dalam proses reunifikasi (U.S. Department of Homeland Security, 2023).

Bagi imigran ilegal, terutama anak-anak yang pernah dipisahkan dari keluarga, EO ini memberikan jalur legal dan akses terhadap visa *parole* kemanusiaan, perlindungan hukum, serta layanan kesehatan mental, yang sebelumnya tidak tersedia. Sementara itu, bagi imigran legal atau holding status hukum, EO ini berfungsi memperkuat prinsip non-diskriminatif dalam

aplikasi hukum imigrasi, khususnya memastikan keluarga yang telah lama tinggal memiliki kesempatan mendapatkan *parole* atau restorasi status.

Meskipun program ini dinilai berhasil mengatasi krisis kemanusiaan, dengan total sekitar 745 anak yang telah di reunifikasi per Juli 2023 dan 795 anak per Maret 2024, termasuk 3.225 anak yang telah bersatu dengan keluarganya sejak awal era administrasi Biden (Department of Homeland Security, 2023), tantangan tetap ada seperti kesulitan menghubungi keluarga yang tidak tercatat lengkap maupun keterbatasan data kontak valid.

e. EO 13986 – *Ensuring a Lawful and Accurate Enumeration and Apportionment Pursuant to the Decennial Census*

EO ini menegaskan bahwa semua orang yang tinggal di AS, tanpa memandang status hukum imigrasinya, harus dihitung dalam Sensus Sepuluh Tahunan. Perintah eksekutif ini menghapus kebijakan era Trump yang mencoba mengecualikan imigran tidak berdokumen dari proses pembagian kursi Kongres dan alokasi dana federal, sebuah langkah yang secara langsung akan memarginalkan jutaan migran, termasuk sekitar 10 juta warga keturunan Meksiko yang menetap di AS, baik secara sah maupun tidak sah (Sanchez, 2021).

Dalam praktiknya, EO ini memberi instruksi kepada Biro Sensus AS (*U.S. Census Bureau*) untuk menjalankan proses sensus secara inklusif, memastikan bahwa pendataan tidak dipengaruhi oleh ketakutan atau diskriminasi yang sebelumnya menghalangi banyak imigran dari partisipasi aktif. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan organisasi akar rumput seperti *Mi Familia Vota* dan *National Association of Latino Elected Officials (NALEO)*, yang secara aktif melakukan edukasi dan mobilisasi di komunitas Meksiko-Amerika untuk memastikan mereka bersedia mengisi sensus tanpa rasa takut akan deportasi atau penyalahgunaan data.

Dalam konteks imigran dari Meksiko, kebijakan ini memiliki dampak langsung dalam meningkatkan representasi politik dan akses terhadap layanan publik. Misalnya, kota-kota seperti Los Angeles, Houston, dan Chicago yang memiliki populasi imigran dari Meksiko yang sangat besar berpotensi menerima pendanaan tambahan untuk sekolah, rumah sakit, transportasi umum, dan program bantuan sosial berkat data sensus yang lebih inklusif.

Jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, Biden melanjutkan tren perlindungan berbasis kemanusiaan seperti Obama, tetapi lebih eksplisit dalam pendekatan multilateral dan digital. Clinton dan Bush menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terbatas, sementara Trump fokus pada restriksi, pemisahan keluarga, dan penolakan suaka. Perbedaan ini juga berkaitan dengan ideologi partai yaitu partai Demokrat yang umumnya lebih terbuka terhadap imigrasi, sementara Republik lebih fokus pada keamanan perbatasan dan deportasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan imigrasi AS pada masa pemerintahan Presiden Biden, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang diambil lebih humanis, inklusif, dan multilateral dibandingkan era sebelumnya, khususnya masa Donald Trump. Melalui lima Executive Order yaitu EO 13993, 14010, 14011, 14012, dan 13986, Biden menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak tanpa pendamping, keluarga yang terpisah, serta pencari suaka, sekaligus memulihkan jalur legal dan menata kembali proses imigrasi. Kebijakan ini menandai pergeseran dari pendekatan represif menjadi berbasis hak asasi manusia, selaras dengan prinsip penanganan migran oleh IFRC, yang menekankan penguatan hak, perlindungan di sepanjang jalur migrasi, dan solusi jangka panjang. Dengan demikian, Biden dinilai mampu mengembalikan fokus kebijakan imigrasi dari kontrol ketat menjadi pengelolaan yang lebih adil dan manusiawi.

#### **REFERENSI**

- Pierce, S. (2017). *Immigration under Trump: A review of policy shifts in the year since the election*. Migration Policy Institute. Migration Policy.
- Yearbook of Immigration Statistics*. (2024). U.S. Department of Homeland Security.
- García , J. (2018). The Bracero Program, 1942–1964. *Latin American History*.
- Security, U. D. (2021). Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2015–January 2018.

Rafael, P.-E., Jonathan, G., & Song, D. (2010). HEALTH CARE ACCESS AMONG HISPANIC IMMIGRANTS: ¿ALGUIEN ESTÁ ESCUCHANDO?[IS ANYBODY LISTENING?].

IFRC. (2009). *Policy on Migration*. Retrieved from [https://www.ifrc.org/sites/default/files/Migration-Policy\\_EN.pdf](https://www.ifrc.org/sites/default/files/Migration-Policy_EN.pdf)

Douglass, M. (2002). *Beyond smoke and mirrors: Mexican immigration in an era of economic integration*.

Fund, N. A. (2021). *Examining the Economic Contributions of Undocumented Immigrants by Country of Origin*.

Lee, E. (1991). *Teori Migrasi*.

The White House. (2021). Executive Order 13993: Revision of Civil Immigration Enforcement Policies and Priorities.

U.S. Department of Homeland Security. (2021). Statement by DHS on the 100-Day Pause on Removals.

Lind, D. (2023). Enforcement Priorities Are Back. What Will ICE Prosecutors Do With Them?

U.S. Customs and Border Protection. (2024). CBP Releases September 2024 Monthly Update.

U.S. Department of Homeland Security. (2023). Fact Sheet: A Review by the Family Reunification Task Force on the Second Anniversary of Its Establishment.

U.S. Department of Homeland Security. (2023). Fact Sheet: A Review by the Family Reunification Task Force on the Second Anniversary of Its Establishment.

Department of Homeland Security. (2023). Family Reunification Task Force: February 2023 Progress Report.

Sanchez, M. (2021). Excluding the Undocumented: How Potential Changes to the Census Could Impact Representation in Our Democracy.